

Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Assa Faelassuffa¹, Eppy Yuliani¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Penulis Korespondensi e-mail: assafaelassuffa@gmail.com

ABSTRACT

The human development index (HDI) is an assessment of the quality of humans based on their health, education and welfare. In addition, with the human development index, the government's performance can be seen. In this article, the human development index focuses on the welfare aspect by looking at the level of labor force participation. Looking at these factors, it is hoped that they can provide input to the local government to determine priorities for human development later. The method used in the article is to examine documents based on existing research case studies. The results obtained are the level of labor force participation has an influence on the human development index. The influence takes a different direction. The labor force participation rate has a positive and / or negative direction towards the human development index. This means that the force participation rate can increase / decrease the human development index.

Keywords: *Human Development Index, Labor Force Participation Rate*

ABSTRAK

Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan merupakan dasar penilaian suatu kualitas manusia yang dikenal dengan sebutan Indeks pembangunan manusia atau disingkat IPM. Selain, itu dengan adanya indeks pembangunan manusia dapat melihat kinerja pemerintah. Pada artikel ini memfokuskan indeks pembangunan manusia pada aspek kesejahteraan dengan melihat pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Melihat pada faktor tersebut diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah setempat untuk dapat menentukan prioritas pembangunan manusia nantinya. Metode yang digunakan dalam artikel adalah menelaah dokumen berdasarkan studi kasus penelitian yang ada. Hasil yang didapatkan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dengan indeks pembangunan manusia saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut memiliki arah yang berbeda yaitu positif dan/atau negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Berarti dapat dikatakan bahwa kenaikan ataupun penurunan indeks pembangunan manusia dapat disebabkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja.

Kata Kunci : *Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.*

1. PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), Indeks Pembangunan Manusia terbentuk melalui empat indikator yang mencirikan usia panjang dan hidup sehat (aspek kesehatan), pengetahuan (aspek pendidikan), dan standar hidup layak (aspek kesejahteraan). Adanya IPM tersebut dapat digunakan sebagai pengukur kemakmuran suatu wilayah, dimana hal tersebut didorong oleh

kualitas sumber daya manusianya. Hal tersebut berguna untuk menunjang pembangunan yang dilakukan. Pengembangan sumber daya manusia tersebut dilakukan dengan mengubahnya menjadi tenaga kerja produktif (Elfindri & Bachtiar, 2004). Menurut Widodo et al. (2011) kemajuan suatu wilayah tidak hanya dilihat dari pendapatan domestik bruto suatu wilayah tetapi juga pada pendidikan dan kesehatan masyarakat wilayah tersebut. Didukung pernyataan dari Melliana & Zain (2013) yang mengatakan bahwa pembangunan suatu wilayah perlu mempertimbangkan aspek ekonomi maupun non ekonomi.

Pendapatan domestik bruto membuat aspek ekonomi mengalami peningkatan. Tentu saja pendapatan domestik bruto tidak terlepas dari manusia yang menjadi faktor produksinya. Pertumbuhan penduduk akan diikuti dengan bertambahnya kuantitas angkatan kerja sehingga tenaga kerja produktif bertambah (Todaro, 2000). Menurut Hayati (2019), rasio ketergantungan dan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Sedangkan penurunan dapat terjadi pada tingkat partisipasi angkatan kerja jika rasio ketergantungan naik.

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase dari penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja (Kependudukan & Nasional, 1994). Kegunaan dari TPAK adalah untuk mengetahui berapa penduduk yang memiliki potensi untuk bekerja. Potensi penduduk untuk bekerja akan tinggi jika jumlah angkatan kerja juga tinggi (Badan Pusat Statistik, 2014). Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi salah satu indikator kesejahteraan dalam penilaian indeks pembangunan manusia. Hal ini didukung oleh pernyataan Hukom (2014), bahwa penyerapan tenaga kerja yang seimbang antara sector pertanian dengan non pertanian dapat merubah struktur ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Berhubungan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, rasio ketergantungan berpengaruh pada nilai TPAK yang ada. Rasio ketergantungan menurut Ando dan Modigliani dalam Richard (2004), menjelaskan bahwa usia masyarakat dapat mempengaruhi pola konsumsinya, Dimana hal ini lebih dikenal sebagai Model Daur Hidup (Life Cycle Model). Model daur hidup menunjukkan bahwa seseorang akan melakukan *dissaving* pada usia non produktif penduduk

yaitu usia 0-14 dan 65+ tahun dan akan menanggung beban hidup orang lain pada usia produktifnya yaitu usia 15-64 tahun.

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang kajian tingkat partisipasi angkatan kerja dengan indeks pembangunan manusia. Dimana pembahasannya akan mengetahui apakah tingkat partisipasi angkatan kerja dengan indeks pembangunan manusia saling mempengaruhi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki. Hal tersebutlah yang nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Todaro (2000), jumlah angkatan kerja selaras dengan pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan semakin meningkatkan jumlah angkatan kerja. Sehingga akan meningkatkan juga pada tenaga kerja produktif. Pada tinjauan Pustaka berikut perlu memahami kependudukan, dimana hal tersebut adalah dasar dari adanya jumlah angkatan kerja. Berikut tinjauan pustaka terkait kependudukan dan jumlah angkatan kerja

2.1 Pendudukan

Menurut Srijanti & Purwanto (2013), penduduk merupakan sekelompok orang yang bertempat pada suatu wilayah tanpa ada permasalahan status kewarganegaraan. Kemudian menurut Wirosuhardjo (1986), Penduduk merupakan kumpulan orang yang berdiam pada suatu wilayah, meski memiliki perbedaan status kewarganegaraan. Pendapat lainnya oleh Simanjuntak (2007), penduduk adalah sekelompok orang yang bertempat pada suatu wilayah untuk tinggal/domisili. Dapat dikatakan bahwa penduduk adalah sekelompok/kumpulan orang yang bertempat pada suatu wilayah untuk tinggal tanpa adanya perbedaan dari status kewarganegaraan.

Berkaitan dengan artikel yang diangkat mengenai tenaga kerja, penduduk terbagi menjadi dua macam, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia mulai dari 15 tahun sampai usia 64 tahun. Sedangkan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk dengan usia 0 sampai 14 tahun dan penduduk usia lebih dari 65 tahun. Pada penduduk usia kerja terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut Badan

Pusat Statistik (2021), penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 samapi 64 tahun dan memiliki pekerjaan/sementara tidak bekerja/pengangguran. Kemudian pada penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun tetapi masih bersekolah/menjadi pengurus rumah tangga/ melakukan kegiatan lain diluar dari kegiatan pribadi.

2.2 Rasio Ketergantungan

Ando dan Modigliani dalam Richard (2004) mengatakan bahwa konsumsi masyarakat dapat mempengaruhi usianya. Dimana hal ini lebih dikenal sebagai Model Daur Hidup (Life Cycle Model). Model daur hidup menunjukkan bahwa seseorang akan melakukan dissaving pada usia non produktif dan pada usia produktif akan menanggung beban hidup orang lain. Rasio ketergantungan merupakan hasil yang didapatkan dengan membandingkan penduduk usia non produktif dan penduduk usia produktif (Kependudukan & Nasional, 1994). Secara matematis dituliskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100\%$$

Rasio ketergantungan di kategorikan menjadi 3, yaitu:

- Beban tanggungan tinggi jika memiliki nilai ≥ 70
- Beban tanggungan sedang jika memiliki nilai 51 – 69
- Beban tanggungan rendah jika memiliki nilai ≤ 50

Rasio ketergantungan dapat berubah-ubah tergantung dari angka kelahiran, angka kematian, dan angka migrasi. Meskipun begitu rasio ketergantungan lebih mudah terpengaruh oleh angka kelahiran. Dimana angka kelahiran yang rendah menjadikan struktur penduduk berubah menjadi lebih banyak yang berusia produktif. Pada pergeseran inilah yang kemudian menjadi bonus demografi.

Bonus demografi menurut Badan Pusat Statistik (2012), merupakan suatu keuntungan pada aspek ekonomi karena bertambahnya jumlah penduduk usia produktif. Dapat dikatakan bahwa bonus demografi dicapai saat rasio ketergantungan rendah, sehingga penduduk usia produktif lebih banyak. Menurut Adioetomo & Samosir (2010), suatu wilayah akan mengalami bonus demografi hanya sekali, dimana puncak dari bonus demografi disebut *Window of Opportunity*. Bonus demografi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal akan membuat banyak peluang

yang bisa dicapai hilang. Dalam mencapai peluang dari bonus demografi tersebut perlu ada dukungan seperti peningkatan sumber daya manusia, lapangan pekerjaan yang luas sesuai dengan mutu dari sumber daya manusianya (Falikhah, 2017).

2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase dari penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja (Kependudukan & Nasional, 1994). Diketuainya TPAK akan membantu melihat potensi penduduk yang bekerja. Potensi penduduk untuk bekerja akan tinggi jika jumlah angkatan kerja juga tinggi (Badan Pusat Statistik, 2021). Semakin tingginya jumlah angkatan kerja, semakin rendah jumlah bukan angkatan kerja. (Payaman, 1998).

Pada tingkat partisipasi angkatan kerja terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhinya menurut Kodrat (2007) adalah usia, jenis kelamin, dan peluang dalam mendapatkan pekerjaan. Pada usia pengaruhnya terlihat pada banyaknya usia produktif yang masih mengenyam pendidikan, sehingga untuk bekerja masih belum menjadi suatu kewajiban. Kemudian pada jenis kelamin memiliki pengaruh dimana perempuan lebih diutamakan untuk mengurus rumah tangga, sehingga tingkat partisipasi kerja pada perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sedangkan pada peluang dalam mendapatkan pekerjaan, dilihat pada nilai tingkat partisipasi kerja, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mengindikasikan besar maupun kecilnya peluang bekerja yang ada. Peluang bekerja yang besar dapat mendorong pendapatan masyarakat lebih tinggi, sehingga akan menciptakan kemakmuran untuk masyarakat (Sukirno, 2006). Selain itu, menurut Hukom (2014), bahwa terdapat siklus dimana penyerapan tenaga kerja dibidang non pertanian yang tidak mengurangi penyerapan tenaga kerja pada bidang pertanian akan surplus, sehingga dapat digunakan kembali pada sektor lainnya. Hal ini lah yang kemudian mengubah struktur ekonomi, kemudian juga dapat mengubah kesejahteraan pada masyarakat.

2.4 Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme atau disingkat dengan UNDP mulai mengenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 1990 (Badan Pusat Statistik, 2014). Dimana IPM terbentuk melalui tiga dimensi yang terbagi menjadi empat indikator yang mencirikan usia panjang dan hidup sehat (aspek kesehatan), pengetahuan (aspek pendidikan), dan standar hidup layak (aspek kesejahteraan). IPM sendiri memiliki banyak kegunaan, sehingga banyak negara

menerapkan konsep dari UNDP termasuk Indonesia. Penerapan yang dilakukan Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1996 dan dihitung berkala setiap tiga tahun. Kemudian pada tahun 2004 perhitungan IPM mulai dilakukan untuk setiap tahun.

a. Indikator Penilaian IPM

Kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak menjadi tiga bagian penting dalam Menyusun IPM. Ketiga dimensi tersebut memiliki rumus perhitungan sendiri sebelum dilakukan perhitungan IPM. Rumus perhitungan dan klasifikasi nilai indikator pembentuk IPM dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Rumus Perhitungan dan Klasifikasi Nilai

Indikator Komponen IPM	Rumus	Satuan	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
Angka Harapan Hidup (AHH)	$\frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Tahun	85	20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	$\frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	Tahun	18	0
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$	Tahun	15	0
Pengeluaran per kapita	$\frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})}$	Rupiah	26.572.352	1.007.436

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Setelah dilakukan perhitungan pada masing-masing indikator maka dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu menghitung IPM dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan}}$$

Sehingga IPM pada suatu wilayah dapat di kategorikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai IPM sama dengan 80,00 atau lebih (sangat tinggi)
- Nilai IPM 70,00 – 79,99 (tinggi)
- Nilai IPM 60,00 – 69,99 (sedang)
- Nilai IPM < 60,00 (rendah)

b. Perkembangan Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2014), Metode perhitungan IPM sudah mengalami beberapa perubahan dari tahun 1996 hingga tahun 2010. Perubahan pada tahun 2010 inilah yang

masih digunakan oleh UNDP hingga sekarang. BPS yang mengadopsi metode perhitungan dari UNDP juga mulai mengubah perhitungan IPM yang diterapkan mulai tahun 2010 sampai sekarang ini. Perbedaan yang tersebut terletak pada dimensi pendidikan dan agregasi perhitungannya. Pada dimensi pendidikan yang mulanya menggunakan angka melek huruf berubah menjadi harapan lama sekolah. Hal ini dikarenakan tidak memberikan gambaran secara menyeluruh kualitas pendidikan dan juga perbedaan pendidikan antar daerah tidak dapat terlihat. Kemudian pada agregasi perhitungan berubah menggunakan metode geometrik karena dapat memberi gambaran mana yang memiliki capaian rendah dan mana yang memiliki capaian tinggi.

2.5 Matriks Variabel, Indikator, dan Parameter

Matriks ini bertujuan untuk menjadi arah dalam pembahasan penelitian. Sehingga akan berkaitan pada substansi pembahasan. Berikut matriks variable, indikator, dan parameter pada tabel 2.

Tabel 2 Variabel, Indikator Dan Parameter

Variabel	Indikator	Parameter
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Sosial	Memiliki dua parameter yaitu penduduk sebagai angkatan kerja dan penduduk sebagai bukan angkatan kerja
Indeks Pembangunan Manusia	Kesejahteraan	Menggunakan parameter yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja

Sumber: Penulis, 2020

3. METODOLOGI

Metodologi pada artikel ini menerapkan metode kualitatif. Menurut Creswell dalam (Raco, 2018), metode kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami suatu masalah. Metode dilakukan dengan telaah literatur berdasarkan tema. Kemudian mengkomparasi beberapa wilayah studi kasus. Studi kasus yang digunakan memiliki lingkup regional dan nasional, yaitu Indonesia, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Barat.

4. PEMBAHASAN

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam penilaian indeks pembangunan manusia. Pada studi kasus dengan lingkup nasional yang dilakukan oleh Ramadayanti (2018), bertujuan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi kerja di Indonesia sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2015. Faktor dipilih secara acak, tetapi memiliki korelasi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Faktor tersebut adalah PDRB, upah minimum, angka partisipasi sekolah, dan indeks pembangunan manusia. Metode yang diterapkan adalah analisis regresi data panel.

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengaruh tersebut sebesar -0,004, menunjukkan bahwa arah pengaruhnya negatif. Hal ini berarti kenaikan sebanyak 1% pada indeks pembangunan manusia akan membuat turun tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,004 persen. Sehingga dapat dikatakan dalam meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia perlu dilakukan pengurangan pada tingkat partisipasi angkatan kerja.

Terdapat tiga penilaian penting dalam menghitung Indeks pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Ketiga penilaian tersebut memiliki lingkup pemahaman yang luas. Pada studi kasus di Provinsi Kalimantan Barat penelitian yang dilakukan oleh Junian et al. (2018) bertujuan mengetahui faktor yang mempengaruhi dan hubungan antar variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Dimana pada faktor yang digunakan dipilih tiga faktor secara acak. Faktor tersebut adalah kepadatan penduduk, tingkat penduduk miskin, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Metode yang diterapkan dalam penelitiannya adalah analisis regresi data panel dan biplot.

Hasil yang didapatkan menunjukkan terdapat pengaruh antara tingkat partisipasi angkatan kerja dengan indeks pembangunan manusia. Pengaruh tersebut sebesar -0,108, menunjukkan bahwa arah pengaruhnya negative. Hal ini berarti kenaikan sebanyak 1% pada tingkat partisipasi angkatan kerja akan membuat turun indeks pembangunan manusia sebesar 0,108 persen. Kemudian pada hubungan antar variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan tingkat penduduk miskin. Maka pada studi kasus ini jika tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat akan diikuti peningkatan penduduk miskin. Hal inilah yang mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia yang menjadikan turun.

Studi kasus selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Melliana & Zain (2013), bertujuan untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2011. Faktor yang digunakan dipilih secara acak tetapi tetap mewakili tiga dimensi dasar penilaian indeks pembangunan manusia. Faktor yang digunakan adalah rasio guru-siswa SMP/MTs, rasio sekolah-murid SMP/MTs, angka partisipasi sekolah SMP/MTs, jumlah sarana kesehatan, rumah tangga dengan akses air bersih, kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB perkapita. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis statistika dengan regresi data panel.

Hasil yang didapatkan menunjukkan terdapat pengaruh antara tingkat partisipasi angkatan kerja dengan indeks pembangunan manusia. Besaran pengaruh tersebut adalah +0,16258, menunjukkan arah pengaruhnya yang positif. Hal ini berarti kenaikan sebanyak 1% pada tingkat partisipasi angkatan kerja akan membuat naik indeks pembangunan manusia sebesar 0,16258 persen. Hasil tersebut didukung dengan data dimana sepanjang tahun 2004-2011 Provinsi Jawa Timur memiliki tren tingkat partisipasi angkatan kerja yang naik.

Berdasarkan dari penjelasan pada ketiga studi kasus. Dapat disimpulkan melalui pada tabel matrik sebagai berikut.

Tabel 3 Matrik Penelitian

	Studi Kasus					
	Indonesia		Kalimantan Barat		Jawa Timur	
Pengaruh antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Indeks Pembangunan Manusia	Terdapat pengaruh antara Indeks pembangunan manusia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengaruh tersebut sebesar -0,004, menunjukkan pengaruh yang negative. Artinya kenaikan indeks	Terdapat pengaruh antara Indeks pembangunan manusia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengaruh tersebut sebesar -0,108, menunjukkan pengaruh yang negative. Artinya kenaikan indeks	Terdapat pengaruh antara Indeks pembangunan manusia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengaruh tersebut sebesar +0,16258, menunjukkan pengaruh yang positif. Artinya kenaikan	Terdapat pengaruh antara Indeks pembangunan manusia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengaruh tersebut sebesar +0,16258, menunjukkan pengaruh yang positif. Artinya kenaikan	Terdapat pengaruh antara Indeks pembangunan manusia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengaruh tersebut sebesar +0,16258, menunjukkan pengaruh yang positif. Artinya kenaikan	Terdapat pengaruh antara Indeks pembangunan manusia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengaruh tersebut sebesar +0,16258, menunjukkan pengaruh yang positif. Artinya kenaikan

	pembangunan manusia akan diikuti menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja.	pembangunan manusia akan diikuti menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja.	indeks pembangunan manusia akan diikuti meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.
--	--	--	---

Sumber: Penulis, 2021

Berdasarkan matriks perbandingan diatas dapat dikatakan terdapat pengaruh antara tingkat partisipasi kerja dengan indeks pembangunan manusia. Perbedaan pada ketiga studi kasus adalah perbedaan pada hasil arah pengaruhnya. Pada studi kasus lingkup nasional (Indonesia) dan Provinsi Kalimantan Barat memiliki arah negatif. Sedangkan pada Provinsi Jawa Timur memiliki arah positif. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pada kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, menurut Agustina & Kartika (2017), dengan adanya peningkatan pada indeks pembangunan manusia menunjukkan produktivitas tenaga kerja yang baik. Produktivitas yang baik tersebut menjadikan daya jual tenaga kerja tersebut menjadi mahal. Hal inilah yang kemudian disiasati oleh perusahaan untuk mengganti tenaga kerja tersebut dengan teknologi untuk mengurangi biaya produksi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Indeks Pembangunan Manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Penjelasan pada studi kasus menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Terdapat dua arah pengaruh yaitu positif dan negatif. Perbedaan arah tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang berbeda pada setiap wilayah. Hal lain yang dapat mempengaruhi juga adalah produktivitas tenaga kerja yang baik. Adanya produktivitas yang baik akan meningkatkan nilai jual tenaga kerja. Sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk mengganti dengan teknologi untuk mengurangi biaya produksi. Artinya dalam hal ini tingkat partisipasi angkatan kerja mempengaruhi indeks pembangunan manusia, tetapi bagaimana pengaruhnya tergantung dari kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan terkait hal yang perlu diteliti lebih lanjut adalah pembuktian dari kesimpulan. Yaitu bagaimana kondisi sosial ekonomi tersebut dapat mempengaruhi hasil antara tingkat partisipasi angkatan kerja dengan indeks pembangunan manusia. Sehingga akan dapat memperjelas tindakan apa yang perlu dilakukan pemerintah. Tetapi, pada wilayah yang memiliki arah pengaruh positif dapat dilakukan pengambilan kebijakan dalam pembangunan manusia dengan menekan angka rasio ketergantungan sehingga akan tercapainya peluang bonus demografi yang selanjutnya dimanfaatkan dengan penyerapan tenaga kerja. sehingga dapat mengubah struktur ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebutlah yang akan meningkatkan nilai dari indeks pembangunan manusia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M., & Samosir, O. B. (2010). Dasar-dasar demografi. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Agustina, I. M., & Kartika, I. N. (2017). Pengaruh Tenaga Kerja, Modal dan Bahan Baku Terhadap Produksi Industri Kerajinan Patung kayu di Kecamatan TegallalangE. *E-Jurnal EP Unud, ISSN, 178–2303.*
- Badan Pusat Statistik. (2012). Analisis Statistik Sosial (Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi). *Jakarta: Badan Pusat Statistik.*
- Badan Pusat Statistik. (2014a). *Angka Partisipasi Kasar (APK)*. <https://sirusa.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2014b). Indeks pembangunan manusia. *Tersedia Pada Http://Www. Bps. Go. Id/Menutab. Php.*
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Konsep/Penjelasan Teknik*. <https://bps.go.id>
- Elfindri & Bachtiar, N. (2004). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Padang: Andalas University Press.
- Falikhah, N. (2017). Bonus Demografi Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 16(32).*
- Hayati, M. (2019). *Analisis Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Rasio Ketergantungan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode*

1981–2018. Fakultas ekonomi dan bisnis uin jakarta.

Hukom, A. (2014). Hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 443-16.

Junian, R., Kusnandar, D., & Sulistianingsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Barat Dengan Regresi Panel Dan Biplot. *BIMASTER*, 7(3).

Kependudukan, B., & Nasional, K. B. (1994). Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. *Penelitian Tingkat Kelangsungan Pemakaian Kontrasepsi Pil Dan Suntikan Di Provinsi Jawa Barat Dan Kalimantan Selatan*. Jakarta: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Bekerja Sama Dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kodrat, D. S. (2007). Analisis Akumulasi Modal Manusia Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Tingkat Partisipasi Sekolah Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah Studi Kasus Di Propinsi Jawa Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 11(3), 293–320.

Melliana, A., & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 2(2), D237–D242.

Payaman, S. (1998). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit FE UI.

Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.

Ramayanti, F. D. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2010-2015*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Richard, P. (2004). The Economics of Adjustment and Growth. *Editorial UPR*. Los Angeles.

Simanjuntak, P. N. H. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Grasindo.

Srijanti, A. R. H. I., & Purwanto, S. K. (2013). Pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa. Penerbit: Graha Ilmu Yogyakarta.

Sukirno, S. (2006). Makro Ekonomi Teori Pengantar, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.

Widodo, A., Waridin, W., & Maria K, J. (2011). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Di sektor pendidikan dan kesehatan Terhadap pengentasan kemiskinan melalui Peningkatan pembangunan manusia di Provinsi jawa tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–183.

Wirosuhardjo, K. (1986). *Kebijaksanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: FEUI.